

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Edisi Khusus

Buton, Buteng, Busel, Butur, Wakatobi, Muna, Mubar, Kolaka
Bombana, Kendari, Baubau

Baubau

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Post

Minggu
10 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Penjelasan Sekda Sultra Asrun Lio Terkait Isu Pergantian Pj Bupati Busel: Saya Mengimbau Agar Tetap Tenang dan Utamakan Kondusivitas



Sekda Sulawesi Tenggara Asrun Lio

Laporan: Mashuri, Baubau Post, Durasi Times

KENDARI, BP-Beredarnya pemberitaan pada sejumlah media terkait isu pelantikan Pj Bupati Buton Selatan (Busel) yang memberikan stigma negatif Pj Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, membuat Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D memberikan keterangan resminya, Rabu (6/11/2024), di Kendari, dan meminta kepada semua pihak terkait, untuk tetap tenang serta mengutamakan kondusivitas, terlebih sesaat lagi semua daerah akan dihadapkan pada momen Pilkada serentak 27 November 2024

Sekda Sultra menerangkan, dalam eksekusi setiap dokumen-dokumen negara, tentu terdapat proses dan mekanisme berlaku, termasuk pergantian Pj Bupati Busel. Bahkan melalui instruksi Pj Gubernur, Pemprov Sultra melakukan respon cepat, meskipun dalam kondisi hari libur, tepatnya pada Minggu Tanggal 3 November

2024, untuk menjemput dokumen negara yang bersifat rahasia tersebut di Kemendagri RI.

Sesuai arahan Pj Gubernur, Pemprov Sultra kerap merespon dengan cepat setiap arahan-arahan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk yang bersifat dokumen-dokumen rahasia negara.

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau Edukasi Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa Pra Dunia Kerja



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan edukasi bagi siswa

SMA/SMK dan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja yang membutuhkan persiapan setelah tamat menempuh pendidikan. Pj Sekda Kota Baubau La

Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau mengatakan, edukasi yang diberikan Pemkot Bau-

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj. Bupati La Haruna dan Anggota Forkopimda Buton Hadiri Rakornas Bersama Presiden di Sentul



Pewarta: Eron

BUTON, BP-Penjabat Bupati Buton La Haruna, SP., M.Si bersama anggota Forkopimda,

Kepala BPS, Ketua KPU dan Bawaslu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat

Lanjutkan ke Hal: 7

Waspada! Enam Kosmetik dan Obat Pelangsing Berbahaya Disita, Ada Berlabel BPOM

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Selatan bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar menyita enam produk kosmetik yang

mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia.

“Jadi ada beberapa barang bukti yang disita

Lanjutkan ke Hal: 7

Bertepatan Dengan Momen Pilkada, Pj Bupati Buteng Minta Mahasiswa KKN UM Buton Jadi Duta Netralitas



BUTENG, BP-Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) H Kostantinus Bukide menitip misi netralitas

Pilkada kepada 880 mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Buton yang melaksanakan Ku-

liah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Buteng.

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Penjelasan Sekda Sultra Asrun Lio Terkait Isu Pergantian Pj Bupati Busel: Saya Mengimbau Agar Tetap Tenang dan Utamakan Kondusivitas

Oleh sebab itu, pada Hari Minggu kemarin, dokumen tersebut telah dijemput langsung oleh Biro Pemerintahan dalam kondisi masih tersegel, untuk dibawa ke daerah dan dilaporkan kepada Pj Gubernur Sultra dengan sesegara mungkin,“ papar Sekda Sultra ini.

Dia melanjutkan, arahan Pj. Gubernur untuk menjemput dokumen tersebut, setelah adanya laporan dari Sekda Sultra yang telah menerima telpon dari Otda Kemendagri terkait informasi pergantian Pj Bupati pada 3 November 2024.

“Dokumen yang masih dalam kondisi tersegel tersebut, kemudian di laporkan kepada Pj Gubernur pada Hari Senin Tanggal 4 November 2024. Pada hari yang sama, Pj Gubernur langsung mendisposisi kepada Sekda Sultra, dimana Jabatan Sekda Sultra dilaksanakan oleh pejabat pelaksana, sebab saya sendiri atau Sekda Sultra defenitif masih berada di Jakarta dan baru kembali ke Kota Kendari pada Hari Selasa Tanggal 5 November 2024,“ paparnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini mengatakan, meskipun jabatan Sekda tidak pernah meninggalkan tempat, namun sesuai aturan, terdapat hal-hal tertentu harus dilakukan oleh Sekda defenitif, termasuk tindaklanjut kegiatan pelantikan.

“Kita ketahui ber-

sama jika pergantian Pj Bupati merupakan kewenangan Presiden RI melalui Mendagri. Mengutip pernyataan Presiden sebelumnya yakni Presiden Jokowi, bahwa Mendagri melakukan evaluasi terhadap semua Pj Gubernur, Pj. Bupati, dan Pj. Walikota setiap tiga bulan, sedangkan Presiden sendiri melakukan evaluasi setiap hari. Untuk itu, Pemprov Sultra mentaati setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dengan tetap mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku,“ terangnya lagi.

Lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini melanjutkan, menindaklanjuti dokumen tersebut maka Pemprov melalui Sekda Sultra tetap akan mengatur agenda pelantikan, sesuai dengan mekanisme dan tata aturan pelantikan. Termasuk wajib memastikan kesiapan kelengkapan pelantikan.

“Kesiapan pelantikan ini, bukan hanya dari segi undangan dan pakaian saja, termasuk juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dokumen pelantikan ini kan turun disaat mendekati momen Pildaka serentak, sehingga Pemprov Sultra perlu memastikan bahwa semua kelengkapan administrasi telah siap, sebelum pelantikan dilakukan,“ terangnya.

Mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO ini menjelaskan, meskipun proses pelantikan per-

gantian Pj Bupati Busel masih terus dilakukan Pemprov Sultra, namun tidak mempengaruhi kegiatan pelayanan termasuk birokrasi, karena tidak terjadi kekosongan jabatan, mengingat SK Pj Bupati mulai berlaku sejak dilakukannya pelantikan.

“Sekali lagi, tidak ada penundaan pelantikan, yang ada adalah memastikan kesiapan pelantikan, kemudian Sekda mengatur jadwal pelantikan sesuai aturan,“ tambahnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sultra, Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd.,M.M yang namanya diusung menjadi Pj. Bupati Busel, merasa heran terkait beredar foto dokumen yang dikeluarkan oleh Kemendagri pada pemberitaan sejumlah media, sebab dirinya pun secara pribadi belum menerima SK tersebut.

Baik sebagai pribadi maupun yang ditunjuk menjadi Pj. Bupati Buton Selatan menyesali beredarnya pemberitaan terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan, dimana yang sebenarnya SK penggantian tersebut, baru diterima oleh Pj. Gubernur pada Hari Senin sekitar pukul 10.00 WITA.

Kadis Kominfo Sultra melanjutkan, jadwal Pj Gubernur untuk Hari Senin hingga hari ini, Rabu 6 November

2024 terbilang padat, sehingga agenda pelantikan belum dapat dilaksanakan.

“Saya sangat menyayangkan dan menyesali beredarnya berita terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Busel yang mengaitkan dengan Pj. Gubernur. Tidak ada unsur kesengajaan, namun memang karena padatnya jadwal Pj. Gubernur yang telah terjadwal, sehingga pelaksanaan pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari Biro Pemerintahan dan Biro Adpim Pemprov Sultra,“ katanya.

Dia pun sangat mengharapkan semua pihak tidak salah persepsi atas proses yang tengah berlangsung.

“Beredarnya dokumen rahasia berupa SK pelantikan di kalangan media, saya pun tidak tahu menahu, karena saya pun belum mendapatkan atau memperoleh SK tersebut. Oleh sebab itu, kami mengharapkan semua pihak menyikapinya dengan bijak. Saya juga dengan tegas menyatakan bahwa Pj. Gubernur Sultra tidak ada niatan untuk melakukan penundaan dan atau lainnya. Semua murni karena jadwal Pj. Gubernur yang tidak bisa diwakili seminggu ini sehingga dengan sendirinya pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan dijadwal kembali oleh Sekretariat daerah sesuai perintah Pj. Gubernur dan Arahan sekda Prov. Sultra,“ tambah-

nya lagi. (*)

Bertepatan Dengan Momen Pilkada, Pj Bupati Buteng Minta Mahasiswa KKN UM Buton Jadi Duta Netralitas

Misi ini diberikan karena pelaksanaan KKN UM Buton angkatan XXVI tahun akademik 2024 selama sebulan kedepan bertepatan dengan momentum Pilkada Buteng 27 November 2024.

Para mahasiswa KKN ini akan ditempatkan di 64 desa/kelurahan, minus Kecamatan Talaga Raya yang terletak jauh di pulau terluar.

“Di samping nanti menjanjikan tugas-tugas dari dosen pembimbing, salah satu tugas tambahan yang saya minta adalah menjadi duta netralitas Pilkada,“

pinta bupati saat menerima dan memberikan arahan kepada 880 mahasiswa KKN UM Buton di pelataran eks Kantor Bupati, Selasa (8/10/2024).

Kostan menilai, titik paling rawan terhadap pelanggaran netralitas Pilkada nanti adalah di kepala desa dan Lurah, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Saya berharap keberadaan adik-adik di penempatan desa/kelurahan bisa menangkal itu semua. Supaya Pilkada Buteng 27 November yang tinggal 55

hari lagi bisa kita lalui dengan aman, lancar, dan demokratis,“ harapnya.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa KKN tidak menjadi tim sukses. Mahasiswa justru harus menjadi duta-duta netralitas ASN, netralitas Kades dan Lurah supaya Pilkada Buteng berjalan dengan aman, damai, lancar, dan demokratis.

“Mudah-mudahan keberadaan adik-adik mahasiswa KKN bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan masyarakat yang ada di desa/kelurahan,“ kuncinya. (*)

Waspada! Enam Kosmetik dan Obat Pelangsing Berbahaya Disita, Ada Berlabel BPOM

dari beberapa pelaku kosmetik, di antaranya dari Feny Frans, Maksi Glow, Besti Glow, ada enam,“ kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, Jumat (8/11).

Produk-produk yang disita langsung diserahkan ke BPOM Makassar untuk diperiksa di laboratorium agar dapat diketahui bahan-bahan yang digunakan tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

“Setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan, di antaranya FF, RG, MH, MG, GG dan NRL,“ ungkapnya.

Kapolda Sulsel menegaskan bakal menindak tegas para pemilik kosmetik jika mengedarkan produknya yang mengandung berbahaya, dengan Undang-undang

kesehatan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

“Tentu saja kalau lamanya hukuman seperti ini bisa juga diterapkan tindak pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 2 huruf paling yang terakhir yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman minimal 4 tahun, itu bisa diterapkan pencucian uang,“ katanya.

Sementara itu, Kepala BPOM Makassar, Hariani mengatakan telah menguji 66 sampel kosmetik dan satu jenis obat tradisional di laboratorium.

“Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah, FF Day Cream Glow-ing positif mengandung raksa atau merkuri, FF Night Cream, ini juga positif mengandung merkuri. Kedua produk ini sebetulnya sudah ter-

daftar ada izin notifikasi dari Badan POM,“ kata Hariani.

Kemudian kosmetik mengandung zat berbahaya yakni, Raja Glow My Body Slim.

“Ini obat bahan alam yang notabene harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Hasil uji laboratorium dia mengandung Bisakodil, zat aktif kimia obat untuk menurunkan berat badan, dan ini tidak boleh,“ ungkapnya.

Selanjutnya, produk kosmetik milik Mira Hayati juga berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terkandung zat raksa atau merkuri.

“Mira Hayati Lightening Skin mengandung raksa ataupun merkuri. Night cream dari MH (Mira Hayati), ini produk TIE tanpa izin edar jadi tanpa izin edar Badan POM dan positif mengandung raksa,“ jelasnya. (*)

Pemkot Baubau Edukasi Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa Pra Dunia Kerja

baupenyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa SMA/SMK/Mahasiswa pada hari Selasa (5/11/2024) yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau. Hal ini merupakan upaya yang baik dalam rangka menyiapkan generasi muda di Baubau. “Peserta hari ini adalah anak-anak SMA/SMK dan anak-anak kuliah, bagi anak-anak yang masih berada di bangku SMA/SMK ten-

tu ada dua langkah yaitu mempersiapkan diri ke perguruan tinggi atau bekerja atau bisa juga kuliah sambil bekerja,“ katanya.

Diitambahkan, Pemkot Baubau telah menginisiasi apa-apa yang harus dipersiapkan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian, para narasumber yang memiliki keahlian di bidang digitalisasi dan teknologi tentunya akan

memberikan pengalaman serta praktek yang baik sekaligus dituntut untuk menghindari penipuan dalam dunia kerja. Demikian pula dengan kehadiran guru pendamping juga diperlukan untuk memberikan edukasi kepada generasi penerus.

La Ode Aswad berharap kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa SMA/SMK/Mahasiswa dapat disebarluaskan lagi. (*)

Jadi kepada guru-guru dan anak-anak yang hadir ditempat ini kami berharap praktek baik ini disebarluaskan lagi kepada anak-anak yang tidak sempat hadir. Olehnya itu, anak-anak yang hadir merupakan orang-orang pilihan utusan sekolah dan kampus masing-masing bisa disosialisasikan ulang kepada teman-temannya. Manfaatkan dengan baik, bertanya sebanyak banyaknya,“ tutupnya. (*)

Pj. Bupati La Haruna dan Anggota Forkopimda Buton Hadiri Rakornas Bersama Presiden di Sentul

dan Pemerintah Daerah dengan Tema Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Kamis, 07 November 2024. Kegiatan

ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dibawah pimpinan Mendagri, Jend. (Purn) Polri, Muhammad Tito Karnavian.

Turut hadir pada giat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming

Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Turut hadir pada giat ini jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur, Kabinda, Ka-

polda, Kajati, Danrem, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Ketua KPU Provinsi, Kab/Kota, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP seluruh In-

tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan hadir di sini,“ katanya membuka Rakornas di SICC, Kabupaten Bogor.

Dalam arahnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak memaksimalkan kolaborasi dalam mengawal program pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara dan daerah harus segera dilakukan agar lebih fokus untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mantan Menhan ini menegaskan aparat penegak hukum jangan main-main terhadap persoalan korupsi sehingga pengawasan dari BPKP, kepolisian dan Kejaksaan sangat diharapkan untuk pencegahan dan

pemberantasan korupsi.

“Para pejabat saya tekankan untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Para penegak hukum, Jaksa dan kepolisian agar konsen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,“ pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam penyampaian laporannya mengatakan acara ini penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif mendukung program prioritas sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmoniskan pemerintah daerah dan Forkopimda. (*)

Gibran Minta Tolong Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis



Laporan: Hadi

JAKARTA-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta tolong kepada seluruh kepala daerah agar mendukung program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

"Jadi saya minta tolong semua bapak ibu yang hadir di sini dukung program ini [makan bergizi gratis], ini program yang ditunggu-tunggu," kata Gibran dalam

Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat Dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Gibran menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan bergizi gratis.

Ia juga menyinggung sudah ada beberapa sekolah yang dikunjungi melakukan uji coba makan bergizi gratis. Bagin-

ya, program ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh orang tua murid guru dan komite sekolah.

"Bahkan sebelum saya dilantik tiap orang nagih 'kapan makan siang gratis mas?' Jadi sekali lagi bapak ibu mohon kerja samanya. semua yang ada di sini untuk sukseskan program ini," ujarnya.

Di sisi lain, Gibran menekankan program makan bergizi

gratis juga sangat strategis untuk para petani lokal hingga ibu-ibu PKK.

"Semua terlibat dalam program ini," katanya.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Gibran telah melakukan peninjauan uji coba di beberapa daerah, termasuk di Jakarta hingga Palangkaraya. (*)

Prabowo Umumkan Nama Pahlawan Nasional Baru Usai dari Luar Negeri

Laporan: Listar

JAKARTA-Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumumkan nama pahlawan nasional baru tahun 2024 usai pulang dari lawatannya ke luar negeri.

"Pemberian gelar pahlawan yang waktunya akan menyesuaikan nanti setelah Presiden pulang dari lawatan luar negeri," kata Gus Ipul di Jakarta, Jumat (8/11).

Karena itu, Gus Ipul memastikan pengumuman nama pahlawan nasional tahun ini tak diumumkan bertepatan pada Hari Pahlawan Nasional 10 November mendatang.

Ia juga enggan membeberkan siapa saja nama-nama calon pahlawan nasional yang sudah diusulkan Kementerian Sosial ke presiden. Namun, usulan nama-nama calon pahlawan nasional itu sudah diajukan ke presiden ketika Tri Rismaharini ma-



Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan nama para pahlawan nasional baru tahun 2024 usai pulang dari lawatannya ke luar negeri

sih menjabat sebagai Mensos.

Gus Ipul hanya menjelaskan mekanisme pengajuan nama calon pahlawan nasional itu berawal dari pengajuan masyarakat kemudian dibawa ke tingkat bupati/wali kota kemudian ke tingkat gubernur.

"Setelah itu nanti diproses di Kementerian Sosial, Kementerian Sosial akan menyeleksi beberapa usulan itu diserahkan ke presiden melalui Dewan Gelar. Nanti Dewan Gelar yang akan mendiskusikan kemudian memilih dari nama-nama yang sudah dikirim oleh Kementerian Sosial," kata dia.

Gus Ipul mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi inspektur upacara (Irup) Ziarah Nasional Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Minggu (10/11) lusa.

Gibran menjadi Irup mewakili Prabowo yang masih berdinasti di luar negeri.

"Tanggal 10 besok Presiden mewakilkan kepada Wakil Presiden," kata Gus Ipul.

Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata pada 10 November 2024 akan digelar pukul 08.00 WIB. (*)

Anggota DPR: Penerima LPDP Mesti Pulang, Kalau Tidak Kembalikan Uang

JAKARTA-Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Bonnie Triyana berpendapat idealnya penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus kembali ke Indonesia usai merampungkan studinya di luar negeri.

Ia menyebut bagi penerima yang memilih bertahan di luar negeri dan enggan kembali ke Indonesia, maka harus mengembalikan biaya pendidikan yang ditanggung negara dengan anggapan sebagai student loan.

Merujuk Cambridge Dictionary, student loan merupakan perjanjian seorang mahasiswa di sebuah universitas untuk meminjam uang dari bank dalam membiayai pendidikan mereka dan akan membayar kembali uang itu setelah lulus dan mulai bekerja.

"Kalau menurut saya sih mestinya

pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan," kata Bonnie lewat sambungan telepon, Jumat (8/11).

Bonnie menilai awardee LPDP yang enggan kembali itu haruslah mengembalikan biaya selama mereka menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menyebut uang yang digelontorkan negara lewat beasiswa LPDP itu merupakan uang rakyat.

"Jadi kalau misalkan mereka enggak balik, ya karena pilihan pribadi mereka ya kan, karena pilihan mereka yang juga harus lakukan ya, balikin," ujar dia.

Meski begitu, Bonnie juga mengakui jika memang keilmuan mereka lebih berkembang di luar negeri, maka hal itu juga baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kondisi itu,

menurutnya, talenta Indonesia tak hanya berguna bagi negaranya semata, melainkan juga bagi dunia internasional.

"Katakanlah, di negara Eropa atau di Amerika dia punya fasilitas yang menunjang keahlian dan keilmuan dia, dia bisa melakukan riset, bisa menemukan hal-hal yang hebat untuk kemanusiaan," ucapnya.

Beasiswa LPDP jangan cuma Saintek

Lebih lanjut, Bonnie kurang bersepakat dengan wacana pemerintah yang lebih mengutamakan calon penerima beasiswa LPDP yang mengambil studi di bidang saintek.

"Saya kurang sepakat ya, jangan kemudian menganggap ilmu sosial humaniora itu juga enggak penting," ujarnya.

Bonnie meminta Mendiknasaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk mempertimbangkan

lebih dalam perihalnya. Ia menyatakan seharusnya negara hadir dan mendukung seluruh bidang keilmuan dan potensi anak bangsa tanpa pandang bulu.

Bonnie yang berlatar belakang sejarawan itu pun menegaskan bahwa bidang soshum tak kalah penting dari saintek.

"Contoh, saya ini kan sebelum jadi anggota DPR. Saya sekretaris tim repatriasi benda yang kita pulangkan dari Belanda tuh, itu juga kan membutuhkan riset, membutuhkan penelitian," ucap dia.

Satryo mengaku memberi kesempatan para awardee LPDP untuk berkarya di mana saja, termasuk bekerja di perusahaan yang baik di luar negeri.

Ia menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tak kembali ke Indonesia. Ia juga memastikan tak ada

Ketua MPR soal Prabowo Hapus Utang Macet UMKM: Amanat Pancasila

JAKARTA-Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet para UMKM, petani dan nelayan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken Selasa (5/11).

Hal tersebut disampaikan Muzani dalam forum "National Building Nation Conference 2024: Beyond Tomorrow-Shaping Indonesia's Future 5.0" di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (9/11).

"Kita saksikan beliau mengeluarkan PP Nomor 47 yang isinya mengatur penghapusan utang rakyat

berupa kredit macet di bank-bank. Saya terus terang bertanya kepada beliau, kenapa Bapak mengeluarkan aturan ini? Jawabannya sederhana, ini amanat Pancasila," kata Muzani dalam keterangan resmi, dikutip Antara.

Muzani mengatakan yang mempersatukan Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini adalah Pancasila. Menurutnya, setiap pemimpin bangsa Indonesia harus memiliki tekad besar untuk terus mempertahankan Pancasila.

"Jadi yang menyatukan kita sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang itu karena Pancasila, dan tidak

ada Pancasila tanpa Indonesia. Jadi upaya untuk mempertahankan Pancasila harus menjadi tekad para pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sekjen Partai Gerindra itu menyebut kepemimpinan Prabowo telah memberikan semangat optimisme tinggi dalam mempertahankan Indonesia dan Pancasila.

"Kita telah mendengar pidato Pak Prabowo di sidang pelantikan 20 Oktober lalu, di Magelang, dan di sidang perdana Kabinet Merah Putih. Beliau bertekad memerangi korupsi, narkoba, judi online, dan lain-lain," katanya. (*)

mengembangkan potensinya di dalam negeri.

"Atau ada penelitian yang di laboratorium yang bagus di luar negeri. Kemudian dia suatu hari menemukan inovasi. Kita bilang, 'Indo-

nesia yang menemukan inovasi', meskipun di luar negeri, kan masih merah putih," kata Satryo usai menggelar rapat dengan Menko PMK Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11). (*)

Pemprov. Sultra Dorong Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Sultra



KENDARI, BP- Pemerintah Provinsi Sultra dibawah kepemimpinan Pj Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, terus berupaya dalam mendorong upaya penanggulangan kemiskinan, sekaligus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bumi Anoa.

Keseriusan tersebut, diantaranya ditandai dengan rapat koordinasi upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Sultra Tahun 2024, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari lembaga kementerian hingga pemerintah kabupaten kota se Sultra, Kamis (7/11/2024), di Kendari.

Sekda Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD mewakili Pj Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rakor tersebut mengatakan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan sistematis, terpadu, dan menyeluruh.

Dia menerangkan, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam UUD Negara RI, untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

“Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh seluruh negara terutama pada negara - negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, dan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya,” tuturnya.

Sekda Sultra tak memungkiri, jika kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan terus menjadi tantangan dalam pembangunan sosial bangsa. 9,03% atau 25,22 juta penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan per Maret 2024.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemiskinan menjadi salah satu dari lima sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, dimana target kemiskinan 0,5-0,8 persen. Sedangkan target RPJMN teknokratik untuk ke-

misikan di tahun 2029 adalah 4,5-5,0 persen,” katanya.

Dia melanjutkan, hal tersebut selaras pula dengan Asta Cita Prabowo Gibran dengan visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu dari delapan misi Asta Cita Prabowo-Gibran adalah “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Isu kemiskinan menjadi konsen pemerintah pusat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat rentan saat ini dihadapkan pada kondisi terbatasnya akses terhadap layanan dasar, terbatasnya akses terhadap infrastruktur dasar dan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan,” tuturnya.

Dia pun berharap, agar kemiskinan di seluruh wilayah Sultra semakin menurun. Namun tentunya dibutuhkan sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program kegiatan harus konvergen dan didukung dengan adanya komitmen bersama.

“Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka diharapkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program yang melibatkan peran serta masyarakat, serta difokuskan pada lokasi prioritas. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” paparnya lagi.

Sekda Sultra menjelaskan, pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,12 % dan menurun

ditahun 2024 menjadi 0,83 %. Hal ini sudah mencapai target nasional. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sultra sebesar 1,65 % ditahun 2023 dan turun menjadi 1,06 % ditahun 2024.

Jenderal ASN Sultra melanjutkan, dalam hal tata kelola pemerintahan, ada tiga hal yang menjadi masalah penanggulangan kemiskinan di Sultra yaitu :

1. Rendahnya ketepatan sasaran program;
2. Integrasi dan koordinasi antar sektor serta koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota belum optimal;
3. Pendanaan untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan yang bersifat langsung kepada masyarakat masih terbatas.

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Kementrian PPN/Bappenas bahwa kendala daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ada lima hal yaitu:

1. Data belum akurat untuk dipakai; data belum dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk secara reel time.
2. Target tidak tercapai; target pembangunan sulit dicapai karena perencanaan dan sistem targeting mengandalkan data yang belum konsisten.
3. Target tidak akurat; akurasi penyaluran bantuan rata-rata 45%. banyak program tidak menasar penduduk miskin.
4. Sinergi program lemah; sinergi penentuan target bansos, jansos dan pemberdayaan atau peningkatan keterampilan untuk mengurangi kemiskinan belum optimal.
5. Belum adaptif; data belum menjawab tantangan kondisi bencana perubahan iklim dan pandemi.

Pj. Gubernur Sultra Terima Kunker Spesifik Komisi II DPR RI Dalam Rangka Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Sultra



Pewartanya: Amran

KENDARI, BP- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan Ketua Tim, Bahtra, beserta rombongan dari Komisi II DPR RI dalam rangka kunjungan kerja spesifik untuk meninjau persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 6 November 2024.

Dalam kunjungan ini, hadir pula jajaran penting, seperti Anggota Komisi II DPR RI, perwakilan KPU RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Forkopimda tingkat I, serta Bupati/Walikota beserta Forkopimda tingkat II dari seluruh kabupaten/kota di Sultra, termasuk Ketua KPU dan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.

Pj. Gubernur Sultra menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan atas kunjungan tersebut. Beliau berharap agar kunjungan ini bisa

memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional di masa mendatang.

Kesiapan Sultra Hadapi Pilkada Serentak 2024 telah memaksimalkan peran seluruh elemen terkait untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar. Sultra memiliki wilayah dengan komposisi perairan 74% dan daratan 26%, dengan 62 pasangan calon tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Pemprov Sultra juga mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan KPU, Bawaslu, dan berbagai pihak terkait. Disdukcapil Sultra secara aktif melakukan verifikasi data pemilih melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD), memastikan seluruh pemilih telah terdata dengan baik.

Untuk menjaga integritas, Pemprov Sultra telah mengeluarkan edaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menindak tegas pelanggaran yang

ada, serta memastikan tidak ada ASN yang mendukung pasangan calon tertentu. Pemprov juga mendukung penuh KPU dan Bawaslu di semua tingkatan, termasuk dalam proses rekrutmen badan ad-hoc dan pemenuhan fasilitas kampanye.

Pengamanan Ketat dan Target Partisipasi Tinggi

Dengan kategori “rawan sedang,” Pemprov Sultra mengoptimalkan koordinasi pengamanan bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pemerintah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 83,82%, sesuai target nasional, dengan capaian perekaman KTP-el sebesar 98,03%, yang difokuskan pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

Pj. Gubernur Sultra berharap, melalui sinergi antara Pemprov, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kepentingan, Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. (*)

“Saya berharap agar kegiatan ini dapat mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sultra.

Melalui kesempatan ini juga, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem,” harapnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Spesialis Koordinasi Pemerintah Pusat- Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, d

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo atau yang mewakili.

Selanjutnya, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra atau yang mewakili, para Kepala Bappeda kabupaten kota se Provinsi Sultra atau yang mewakili, Perwakilan Organisasi Non Pemerintah, dan berbagai pihak terkait lainnya.(Mashuri)

Pimpin Apel, Pj Bupati Busel Paringringi Ingatkan Jaga Netralitas ASN



Pewarta: Eron

BUSEL-Parinringi, SE., M.Si, Pj. Bupati Buton Selatan sebagai Pembina Apel Gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pada Minggu I bulan November 2024 di Lapangan Upacara kantor Bupati Buton Selatan pada 4 November 2024. Dalam sambutannya Pj. Bupati Buton Selatan mengatakan bahwa laporan-laporan Keuangan laporan Administrasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan juga Alhamdulillah berjalan dengan maksimal serta pembahasan APBD-P Kabupaten Buton

Selatan kita juga melaksanakan dengan baik dan maksimal dan Alhamdulillah dari 17 kota/Kabupaten, Kabupaten Buton Selatan termasuk yang tercepat di dalam penanganan pelaksanaan kegiatan perubahan anggaran itu sendiri.

Itu dibuktikan dengan evaluasi pertama di Pemprov Sulawesi Tenggara termasuk Kabupaten Buton Selatan dan Alhamdulillah hari ini DPA kita sudah selesai semua program-program bisa kita jalankan dengan baik.

Parinringi, SE., M.Si, Pj. Bupati Buton Selatan menghimbau bahwa Pemilihan Kepala Daerah kurang lebih

23 hari lagi saya berharap kepada kita sekalian untuk mari kita tetap menjaga keamanan dan kenyamanan daerah kita masing-masing, baik diri kita maupun keluarga kita, kelompok masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Buton Selatan untuk mari kita menjaga dan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah ini. Siapa pun nanti yang terpilih menjadi Bupati definitif di Kabupaten Buton Selatan itu adalah putra-putra terbaik di Kabupaten Buton Selatan.

“Kita berharap kepada kita sekalian mari kita sama-sama menjaga daerah kita untuk tetap menjaga

kondusifitas, menjaga keamanan, saling menghargai perbedaan pendapat itu hal yang biasa tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk sama-sama menjaga Kabupaten Buton Selatan ini tetap Aman dan Damai untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang monumental di Kabupaten Buton Selatan dan mendukung siapa pun yang nanti terpilih menjadi bupati definitif.

Lebih lanjut orang Nomor Satu di Bumi Gajah Mada agar Netralitas ASN tetap dijaga dalam menghadapi pilkada serentak pada 27 November mendatang. (*)

Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide Optimis PLAKAT Perkuat Ketahanan Pangan

BUTENG, BP-Program Pemanfaatan Lahan Perikanan Terpadu (PLAKAT) diluncurkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.

PLAKAT ini telah menyasar ke desa-desa setelah sebelumnya dicontohkan Dinas Pangan melalui beberapa desa binaan disetiap kecamatan.

Dalam desa binaan itu ditanami jenis sa-

yur-sayuran. Di antaranya, kangkung, terong, cabai, tomat, sawi, daun bawang, daun sup dan berbagai jenis sayuran lainnya.

Kedepannya, diharapkan dapat dikembangkan lagi jenis tanaman pangan lainnya. Desa diminta mampu berinovasi, baik dari jenis tanamannya seperti buah-buahan maupun sistem pola tanamnya secara hidroponik atau lainnya.

Dengan alokasi 20 persen anggaran ketahanan pangan

dari dana desa disetiap desa, PLAKAT ini akan terus eksis dalam jangka panjang.

Pj Bupati Buteng H. Kostantinus Bukide, SH. M.Si, optimis PLAKAT ini akan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Buteng bila krisis pangan terjadi secara global kedepannya.

Kostan menuturkan, program PLAKAT ini diluncurkan pihaknya karena kondisi alam Kabupaten Buteng merupakan batu bertanah, sehingga san-

gat tepat bila dikembangkan media tanam polybag.

Selain itu, pola konsumtif masyarakat Kabupaten Buteng sangat tinggi. Kebutuhan pangannya berharap dan bergantung dari daerah lain.

Risikonya, bila harga pangan daerah lain tersebut naik, maka akan berimbas pada kenaikan Sembako di Kabupaten Buteng. “Risiko ini yang harus kita pangkas dengan program PLAKAT,” imbuhnya.

Mantan Sekda Ka-



bupaten Buteng ini berharap, program PLAKAT dapat dijalankan dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Mungkin kedepannya kita akan adakan lomba PLAKAT terbaik antar kecamatan atau antar desa, supaya ada semangat dan motivasi dalam menjalankan program PLAKAT ini,” tambahnya.

Pj Bupati Buteng H. Kostantinus Bukide bersama isteri dan Kadis Pangan Malik, Kadis Sosial Nurlia Husuni dan Camat Mawasangka Tengah panen sayur terong.

Kostan mengakui, sebelumnya anggaran ketahanan pangan diprogramkan sendiri-sendiri oleh pemerintah desa. Ada yang memprogramkan untuk bibit sapi, ada pula yang memprogramkan untuk bagang.

“Saya bilang tidak akan tepat sasaran dengan ketahanan pangan. Coba kita belikan bibit kangkung. Kangkung setiap 21 hari sudah bisa panen,” cetusnya.

Bayangkan saja, kata dia, kalau semua desa dalam satu kecamatan saja tanam kangkung. Tadinya kangkung harus datangkan dari luar, sekarang bisa dijual sendiri.

“Jadi ada peningkatan. Dari daerah konsumtif, kita bisa menjadi daerah produsen kangkung. Itu baru satu komoditi saja, bagaimana kalau dengan berbagai komoditi tanaman pangan lainnya,” terang Kostan.

Ia mengambil contoh kasus seperti di pesantren Al-Amin Kecamatan Mawasangka. Di pesantren itu ada program produksi Saraba dan membutuhkan jahe merah puluhan ton per bulan yang didatangkan dari luar.

Ia kemudian menyampaikan kepada Camat Mawasangka agar masyarakat di sekitar pondok pesantren melalui program PLAKAT bertanam jahe merah. Dengan begitu, ada kolaborasi antara pondok pesantren yang memproduksi Saraba dan masyarakat desa sekitar yang menghasilkan jahe merah.

Pemerintah desa setempat dengan anggaran ketahanan pangan 20 persen dari dana desa, membeli bibit jahe merah kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk

menanamnya melalui program PLAKAT.

“Kalau ini dijalankan dengan maksimal, maka kedepannya kita juga akan menjadi produsen jahe merah. Ini yang menjadi obsesi kita,” tukasnya.

Seberapa besar peluang PLAKAT ini agar Kabupaten Buteng berpotensi menjadi daerah produsen tanaman pangan?

Menurut Kostantinus Bukide, itu tergantung komitmen antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat Buteng sendiri.

Sebagai pemerintah daerah, pihaknya sudah ada Dinas Pertanian. Ada Penyuluh Pertanian yang bertugas mengawal dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menanam yang baik.

Kemudian program PLAKAT itu sendiri di-backup Dinas Pangan. Sumber dananya melalui dana desa yang akan dikoordinir Dinas Pemerintah Desa.

Tim Penggerak PKK juga punya andil. Mereka akan memberdayakan ibu-ibu di desa. Mengedukasi untuk membuat kegiatan yang lebih produktif dengan PLAKAT ini.

Bagaimana peran pemerintah desa sendiri? Mereka tidak dicampuri lagi untuk pengadaannya. Semua diserahkan ke desa dengan mekanisme yang dibuat sendiri.

Pemerintah daerah cukup membantu memfasilitasi saja. Kira-kira dari dana ketahanan pangan mereka yang 20 persen dari dana desa mau diprogramkan apa.

“Itu kita yang fasilitasi, kita bantu. Tapi pengadaannya sendiri, serahkan ke desa. Jangan sampai ada pemikiran teman-teman kepala desa, bupati mau ambil untung dari situ,” paparnya.

Misalkan desa mau beli bibit kangkung. Terserah mau beli dimana, desa sendiri yang adakan. Kalau pemerintah daerah lagi yang adakan, kesannya bupati sudah kerja sama dengan penjual bibit kangkung.

“Kalau pola ini seiring sejalan dan dimasifkan pada 67 desa di Kabupaten Buteng, maka peluang dan potensi kita menjadi daerah produsen tanaman pangan kedepan dapat terwujud,” pungkas Kostan. (Rahim)

Bapelkes Sultra Optimis Raih Akreditasi A

Laporan: Warman

KENDARI, BP- Kepala Pelatihan Kesehatan Prov. Sultra, Thalib memaparkan Rencana Aksi penyelenggaraan pelayanan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada acara Penilaian Akreditasi Institusi BAPELKES yang diselenggarakan oleh Dirjen Mutu Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI mulai tanggal 5 - 7 yang diselenggarakan melalui sambungan daring aplikasi zoom meeting.

Berdasarkan berkas penilaian, Renstra dan Rencana Aksi serta tayangan video dan foto fasilitas yang terdapat di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Prov. Sultra, Tim Penilai Akreditasi Kementerian Kesehatan memungkinkan mengeluarkan Sertifikasi Akreditasi untuk BAPELKES Prov. Sultra.

Pembedahan item-per item pada Rencana Aksi BAPELKES Sultra yang ditayangkan menjadi



pembahasan serius dan pendalaman oleh Aksesori, dimana setiap indikatornya diberikan masukan dan koreksi dari tim Akreditasi Kementerian Kesehatan RI.

Adapun penilaian yang dilakukan pada kegiatan ini, berdasarkan standarisasi BAPELKES Sultra menjadi pembahasan interen Kementerian Kese-

hatan RI untuk sertifikasinya, dengan melengkapi catatan-catatan pelengkap sampai batas waktu tgl. 7 November 2024. (*)

Komisi II DPR RI dan Pj. Gubernur Sultra Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Gratis di SMAN 4 Kendari

Laporan: Yeti

KENDARI, BP- Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, S.PWK., melakukan kunjungan ke SMA Negeri 4 Kendari dalam rangka pelaksanaan uji coba program makan siang bergizi gratis untuk siswa SMA/SMK. Program ini meru-

pakan bagian dari inisiatif Presiden dan Wakil Presiden RI untuk meningkatkan gizi pelajar di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya bagi siswa tingkat SMA dan SMK. Kegiatan tersebut berlangsung pada 6 November 2024.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah anggota DPR RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Pj. Wali Kota Kendari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Sultra, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta para guru dan siswa SMAN 4 Kendari.

Setibanya di lokasi, rombongan Pj. Gubernur dan anggota DPR RI disambut dengan tarian adat sebagai simbol penghormatan dan ucapan selamat datang. Setelahnya, rombongan menuju salah satu ruang kelas di mana telah disiapkan makan siang bergizi gratis untuk

para siswa. Salah satu siswa mengungkapkan rasa terima kasihnya atas program ini, yang dinilai sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan gizi, sehingga bisa belajar dengan lebih baik dan fokus.

Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, sangat mendukung implementasi program

Kemendikdasmen Respons Guru Supriyani Disomasi Bupati Konawe Selatan

KENDARI- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat buka suara terkait somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga kepada guru honor di SD Negeri 4 Baito, Supriyani.

Somasi tersebut dilayangkan usai pengakuan Supriyani yang ditekan untuk menyetujui perdamaian terkait kasus dugaan pemukulan siswa yang merupakan anak polisi. Dalam kasus ini juga ada dugaan pemerasan yang dilakukan pada Supriyani.

“Kementerian PDM (Pendidikan Dasar dan Menen-

gah) sejak awal sudah langsung memberikan respons dan langkah-langkah penyelesaian,” kata Atip kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (9/11).

Atip mengatakan pihaknya telah mengirimkan tim ke Konawe Selatan untuk mengumpulkan informasi mengenai duduk perkara kasus yang membelit Supriyani.

“Karena masalah ini sudah masuk ke ranah hukum, kami mengikuti sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Atip mengaku pihaknya juga sudah melakukan langkah afirmasi dalam pengangkatan Supriyani

sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lebih lanjut, Atip menyebut bakal membuat nota kesepahaman dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencegah terulang lagi kasus serupa yang berdampak pada muruah guru dan juga proses pendidikan.

“Agar dalam penanganan kasus seperti ini tidak dilakukan pendekatan hukum pidana melainkan penyelesaian non-judisial, kekeluargaan, dan pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif (restoratif justice),” katanya. (*)



makan siang gratis ini. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menyiapkan infrastruktur penunjang, meskipun program ini utamanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Dengan dukungan dari Pemda Kabupaten/Kota, diharapkan implementasi program di sekolah-sekolah dapat berjalan lebih optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtra juga menekankan bahwa keberlanjutan program makan siang bergizi gratis ini akan berdampak

positif bagi perkembangan UMKM lokal. Kebutuhan bahan pangan, seperti telur, daging, susu, dan sayuran, diharapkan dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Dengan demikian, ekonomi masyarakat sekitar juga akan terdorong karena perputaran uang terjadi di tingkat lokal.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa uji coba program makan siang gratis ini dilakukan serentak di empat sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu SMAN 4 Kendari, SMKN 1 Kendari, SMKN 2 Kendari, dan SLB Kendari,

dengan total penerima manfaat sebanyak 3.775 siswa. Ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya dalam menginisiasi program ini. Menurutnya, tambahan nutrisi dari makan siang bergizi akan mendukung tumbuh kembang siswa di Sulawesi Tenggara, serta meningkatkan semangat belajar mereka.

“Dengan asupan gizi yang cukup, saya berharap generasi pelajar kita di Sulawesi Tenggara akan semakin cemerlang ke depannya,” ucap Andap. (*)

Harian Pagi

Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , , mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra : _

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Jaksa Agung Ancam Sikat Jaksa Tak Nurut Arahan Berantas Korupsi



Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam menindak para jaksa yang tidak patuh terhadap arahan soal pemberantasan korupsi.

JAKARTA- Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam menindak para jaksa yang tidak patuh terhadap arahan soal pemberantasan korupsi.

Burhanudin meminta anak buahnya untuk menindak segala praktik korupsi di pemerintahan daerah. Dia juga ingin kejaksan ikut membenahi sistem usai kasus ditangani.

“Saya minta para kajari setelah ka-

lian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” kata Burhanuddin pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

“Kajari, kajati, sanggup? Lakukan

itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak,” imbuhnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Dia memastikan kejaksan tak berupaya mengobjekti pemerintah daerah atas kasus korupsi.

Kejaksan, ucapnya, hanya ingin membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Hal ini dilakukan demi

memperbaiki pandangan dunia terhadap Indonesia.

“Karena penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia sangat rendah. Dan untuk itu bahkan kita masuk ke wilayah negara yang paling korup,” ujarnya.

“Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri,” kata Burhanuddin melanjutkan. (*)

AKBP Achiruddin Ditahan Usai MA Batalkan Vonis Bebas Kasus Timbun BBM

MEDAN-Eks Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan akhirnya dieksekusi Kejari Medan ke Rutan Tanjung Gusta setelah vonis bebasnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara terhadap AKBP Achiruddin di kasus pembunuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi.

Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting mengatakan MA telah menerima permohonan kasasi yang diajukan Kejari Medan. Dalam putusan nomor 5996 K/Pid.Sus/2024, MA membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Medan terha-

dap AKBP Achiruddin.

“MA mengabulkan permohonan kasasi Kejari Medan pada 9 Oktober 2024. Yang bersangkutan dipidana penjara selama 2 tahun, denda Rp50 juta subsidier 9 bulan penjara. Sedangkan eksekusi dilakukan pada 7 November 2024,” kata Adre kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/11).

Sebelumnya, AKBP Achiruddin divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Oloan Silalahi pada Senin (30/10/2023). Majelis hakim PN Medan memutuskan Perwira tinggi Polda Sumut itu dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan agar terdakwa Achiruddin Hasibuan dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, harkat, serta martabatnya.

Padahal jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Medan menuntut AKBP Achiruddin dengan pidana selama 6 tahun penjara, denda Rp50 juta subsidier 3 bulan penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa lainnya yang merupakan rekan dari Achiruddin yakni Direktur PT Almira Nusa Raya (ANR) Edy dan Manajer Operasional Parlin.

Atas vonis bebas itu, jaksa kemudian mengajukan kasasi.

Dan, majelis hakim MA membatalkan vonis bebas terhadap AKBP Achiruddin itu.

Dalam kasus ini, AKBP Achiruddin menyewa lahan yang tak jauh dari rumahnya di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sejak Tahun 2018 untuk dijadikan gudang penimbunan BBM subsidi jenis solar.

Kemudian BBM dibeli dari sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan, Binjai dan Deliserdang dengan harga Rp6.800 / liter dan tergolong dalam batas normal. Lalu BBM itu diangkut dan dipindahkan ke salah satu tangki muatan 16 ton di gudang penimbunan PT Almira Nusa Raya di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba,

Pakar Kritik Wacana Ganti Judul RUU Perampasan Jadi Pemulihan Aset



Ilustrasi semangat tegas pemberantasan korupsi

JAKARTA-Pengamat hukum Pieter Zulkifli menilai rencana penggantian diksi perampasan menjadi pemulihan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menghilangkan esensi dan mengurangi semangat tegas pemberantasan korupsi.

Menurutnya, perampasan aset ilegal bukan sekadar soal pemulihan atau pengembalian aset, melainkan bagian dari upaya memberantas akar korupsi di Indonesia.

“Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah perubahan kata ini hanyalah soal linguistik atau justru mengengurui esensi dari RUU tersebut?” kata Pieter dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (9/11), dikutip dari Antara.

Pieter berharap DPR tidak hanya berfokus pada istilah lantaran berbagai

pasal yang mengatur tentang pembatasan penggunaan uang kartal dan penyitaan aset tidak wajar merupakan langkah konkret yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Dia pun menyinggung sikap DPR yang tak sejalan dengan pemerintah terkait penggantian diksi dari RUU tersebut, salah satunya Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia.

“Sebab apa pun istilahnya, yang terpenting keberanian dan komitmen nyata untuk menindak korupsi hingga ke akar-akarnya demi Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut ada pembahasan terkait perubahan kata dalam judul RUU Perampasan Aset. Salah satu opsi yang mengemuka yai-

tu jadi RUU Pemulihan Aset.

Doli menyebut kemungkinan itu muncul setelah Baleg mempelajari tindak lanjut upaya pemberantasan korupsi berdasarkan aturan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi.

“Saya cari tahu ternyata rupanya di dalam UNCAC itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery. Kalau recovery itu, ya pemulihan,” kata Doli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

Di sisi lain, Pimpinan KPK bertandang menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipras) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (7/11).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, itu turut membahas beberapa isu seperti RUU Perampasan Aset. (*)



Terdakwa kasus pembiaran penganiayaan dan kasus BBM solar ilegal Achiruddin Hasibuan.

Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Pembelian BBM tersebut dilakukan beberapa kali dalam hari yang sama. BBM tersebut disimpan un-

tuk waktu yang lama. Ketika harga BBM solar langka, dan harga relatif tinggi, maka AKBP Achiruddin melakukan penjualan kembali BBM tersebut kepada kon-

sumen industri dengan harga di atas harga subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan rata rata keuntungan Rp300 per liter (Alwan)

1

CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
**Drs. H. RASYID
MANGURA, M.H.**

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU,
DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.

2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.

4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

5. MENOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.

6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF.

2

CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
**ARIS MARWAN SAPUTRA,
S.H.**

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN
MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.

2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.

4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF.

5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRASPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.

6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3

CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.

2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.

3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.

4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).

5. MENGUTAKKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4

CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
**LA ODE RAFIUN, S.Pd.,
M.Si.**

PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TAMBAI DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT BUTON YANG MERELIKI KELUANGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2024-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.

2. MENINGKATKAN KUALITAS SUBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA SERTA TERJANGKAU.

3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.

4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORMA KEAGAMAAN.

5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.

6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAIKAN KARASITAS DAERAH.

5

CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
**LAODE MUHAMAD
SUMARLIN BUCHARI, S.E.**

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.

2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.

3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.

5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6

CALON BUPATI
**ALVIN AKAWIJAYA
PUTRA, S.H.**

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDISIF DAN BERBUDAYA.

2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.

3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.